

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DAMAI SHINTA PERMATA

157310515

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang di tulis dalam bentuk usulan penelitian ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru”** ini penulis tulis dan diajukan ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salut dan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor UIR bersama Dekan Fisipol yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang Beliau pimpin.
2. Bapak Budi Muliando S.Ip., M.Si selaku Ketua Program studi dan jajaran dosen pada jurusan ilmu pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan usulan penelitian ini.
3. Bapak Dr. H. Zaini Ali M.Si dan Bapak Andriyus S.Sos.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan

pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

4. Seluruh Staf, Karyawan/ti Tata Usaha dan serta Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi mengenai surat menyurat dan keperluan penulis yang berhubungan dengan penyelesaian skripsi ini.
5. Teristimewa dengan ucapan terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan kepada Orangtua yang terkasih Ayahanda Jhoni Kenedi dan Ibunda Syahriani yang telah bersusah payah membesarkan dan mendidik saya, memberikan dorongan baik moral maupun material untuk menyelesaikan studi saya. Serta kepada Abang saya Dody Armansyah Saputra, Kakak saya Devy Arnila Putri, serta Abang Ipar saya Arnold. Dan Nenek saya Rosma, Paman Saya Jumaidi, juga Ibu saya Kamsani. Serta seluruh keluarga yang sudah menyemangati dan memberikan motivasi kepada saya.
6. Teman-teman seperjuangan di Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Periode 2018/2019 yaitu Andhika, Iranda Firiansyah, Bambang Setiyadi, Ricky Maulana, Elisyah Fitriani, Ririn Oktavia, Siti Zubaidah, Abdi Yoriza, Rahmat Hidayat. Dan adik-adik Himip tercinta Sandra Anggesti, Lia Roni, Miki Permata Sari, Nadia Oktarisa, Winda Handayani, Yessi Ferwita Sari, Jiwatama, Ilham Yurinanda, M. Habibi, Ferdian. Dan abang-kakak senior Ramona Fitri.S.IP, Ferry Arghandi,

Iskandar Taher.S.IP, Resti Rahma Sari.S.IP, Fahrizal Ariyadi. Serta senior yang juga cukup membantu abang Aditya Wiratama S.IP, Ardi Pranata Hotri S.IP. Serta seluruh keluarga besar Himip yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta membantu dalam proses pembuatan Skripsi ini.

7. Sahabat tercinta Dwi Desfriyandi, Tri Oktapani, Olviazi, Nurnila Maharani, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.
8. Teman tercinta Nadia Anggraini yang telah banyak membantu dan menyemangati dalam Proses pembuatan Skripsi. Dan Teman Tercinta di Duta Fisipol Uir 2017 dan Bujang Dara Bengkalis 2018 yang tidak dapat disebutkan keseluruhannya.
9. Teman seperjuangan seluruh Anggota Kelas IP.F, dan teman terdekat Indah Amellia Fani dan Siti Maya sari.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 2 Februari 2019

Penulis,

Damai Shinta Permata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
LEMBAR PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	18
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	18
2. Konsep Kebijakan	20
3. Konsep Evaluasi	22
4. Konsep Keluarga	24
5. Konsep Efektifitas	26

6. Konsep Manajemen Pemerintahan	27
7. Konsep Efektif	28
8. Konsep Pembinaan	28
9. Konsep Kependudukan	30
10. Konsep Keluarga Berencana	31
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Populasi dan Sampel	40
D. Teknik Penarikan Sampel	40
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	42
G. Teknik Analisis Data	43
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	45
1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	45
2. Keadaan Geografi	45
3. Kependudukan	46
4. Pemerintahan	47
5. Perekonomian	48
B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru	48
1. Sejarah singkat DIS DALDUK-KB Kota Pekanbaru	48
2. Kedudukan dan Tugas Pokok DIS DALDUK-KB	49
3. Visi dan Misi DIS DALDUK-KB Kota Pekanbaru	49
4. Fungsi DIS DALDUK-KB Kota Pekanbaru	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Identitas Responden	51
1. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin	51
2. Identitas Responden berdasarkan Umur	52
3. Identitas Responden berdasarkan Jenjang Pendidikan	52
B. Hasil Penelitian	53
1. Efektifitas	54
2. Efisiensi	57
3. Kecukupan	60
4. Pemerataan	63
5. Responsivitas	66
6. Ketepatan	69
C. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.....	74
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR KEPUSTAKAAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk dan Luas Kota Pekanbaru ...	5
I.2 : Jumlah Peserta Keluarga Berencana Aktif Kota Pekanbaru	14
II.1 : Operasional Variabel	34
III.1 : Populasi dan Sampel	40
III.2 : Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian	44
V.1 : Jenis Kelamin dari masyarakat yang mengikuti Program KB.....	51
V.2 : Tingkat Umur dari masyarakat yang mengikuti Program KB	52
V.3 : Jenjang Pendidikan dari masyarakat yang mengikuti Program KB	53
V.4 : Tanggapan Responden dari masyarakat yang mengikuti Program KB terhadap indikator Efektifitas	54
V.5 : Tanggapan Responden dari masyarakat yang mengikuti Program KB terhadap indikator Efisiensi	57
V.6 : Tanggapan Responden dari dari masyarakat yang mengikuti Program KB terhadap indikator Kecukupan	61
V.7 : Tanggapan Responden dari masyarakat yang mengikuti Program KB terhadap indikator Pemerataan	64
V.8 : Tanggapan Responden dari masyarakat yang mengikuti Program KB terhadap indikator Responsivitas	67
V.9 : Tanggapan Responden dari dari masyarakat yang mengikuti Program KB terhadap indikator Ketepatan	70
V.10 : Rekapitulasi tanggapan responden dari masyarakat yang mengikuti Program KB	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1 : Kerangka Pikir 32



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Kuisisioner (Untuk Masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana)
- Lampiran 2 : Daftar Wawancara untuk Pihak Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru
- Lampiran 3 : Rekap Telly Data Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru
- Lampiran 4 : Struktur Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru
- Lampiran 5 : Dokumentasi penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru
- Lampiran 6 : SK Dekan Fisipol Uir Nomor.245/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi
- Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Nomor.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/17656 dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsin Riau
- Lampiran 8 : Surat Rekomendasi Penelitian Nomor.071/BKBP-REKOM/2019/315 dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru
- Lampiran 9 : Surat Keterangan Nomor.800/DISDALDUKKB/2019/161 dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

LEMBAR PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Damai Shinta Permata
NPM : 157310515
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri yang saya tulis dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya adalah benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari telah ditentukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata telah melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Februari 2019

Pelaku Pernyataan,

Damai Shinta Permata

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA
PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh

Damai Shinta Permata

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Program Keluarga Berencana

Kota Pekanbaru merupakan kota metropolitan yang memiliki jumlah penduduk yang tertinggi di Provinsi Riau. Perkembangan Kota Pekanbaru semakin pesat. Akibatnya, pertumbuhan penduduk dan pemerintah Kota Pekanbaru dalam menekan laju pertumbuhan penduduk adalah pelaksanaan Program Keluarga Berencana. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data serta melakukan wawancara sebagai pembandingan jawaban dari kuisioner, data yang terkumpul kemudian di analisis untuk melihat kondisi empiris dan objektif, guna menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dapat dikatakan Cukup Baik, dengan hasil Rekapitulasi tanggapan responden sebanyak 22 orang dengan persentase 55%. Hal ini dapat dilihat dari 6 indikator yang telah penulis tetapkan yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupann, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Faktor penghambat dalam Pelaknaaan Program Keluarga Berencana yaitu, masih kurangnya informasi dan sosialisasi dari pihak Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, masih kurangnya komunikasi aparatur pemerintah dengan masyarakat, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program Keluarga Berencana.

EVALUATION OF IMPLEMENTATION OF THE FAMILY PLANNING PROGRAM AT THE POPULATION CONTROL OFFICE AND FAMILY PLANNING IN PEKANBARU

ABSTRACT

By

Damai Shinta Permata

Keywords : Evaluation, Implementation Of Family Planning Programs

Pekanbaru city is a metropolis that has the highest population in Riau Province. The Development of Pekanbaru city is growing rapidly, As a result , annual population growth is also increasing. One of the Pekanbaru government in reducing population growth is the implementation of Family Planning programs. On the basic, the city government issued a new city regulations in Pekanbaru No.9 Of 2016 concerning the formation and units Of Pekanbaru City, In Organizing a Government order in the field of population control and family, planning as the research study to find out the implementation of family planning programs in the population control service and family planning in Pekanbaru. This study uses quantitative methods and qualitative methods prioritizes questionnaire data as a data collection tool and conducts interview as a comparison of the answer from questionnaire. The collected data is then analyzed to see the empirical condition, and objectives to answer the purpose of this study. The result of this study indicate that the evaluation of the implementation of family planning program in the population control department and the family control of Pekanbaru City can be said to be quite good with the result of recapitulation of respondents responses as many as 22 people with a percentage of 55 percent. This can be seen from the 6 indicators that have been determined by researchers, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. While the inhibiting factor in the implementation of family planning programs is that there is still a lack of information and socialization from the official control of the population and family planning in Pekanbaru, there is still a lack of communication between government officials and the the community, and there is still a lack of public awareness to take part in family planning program.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bedasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka untuk mencapai tujuan tersebut dibentuklah pemerintah serta dibagilah Indonesia itu atas Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 Ayat (1).

Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dalam pasal 18 Ayat (2) bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup dan berkembang di Daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada Daerah dalam bentuk wujud dan tugas serta kewajiban yang harus dipikul oleh Daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal tersebut berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan Pemerintahan Daerah Provinsi serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyangkut pelayanan dasar, yaitu :

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Perkerjaan Umum
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Urusan wajib yang menyangkut Non Pelayanan Dasar, yaitu :

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3. Pangan
4. Pertahanan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi pendudukan dan catatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman
13. Penanaman modal usaha
14. Kepemudaan dan olahraga
15. Statistik
16. Persandian
17. Kebudayaan
18. Perpustakaan
19. Kearsipan

Dasar filosofi lahirnya kebijakan Program Keluarga Berencana karena adanya permasalahan kependudukan, yang meliputi :

1. Pertumbuhan Penduduk;
2. Kelahiran Penduduk;
3. Kematian Penduduk;
4. Perpindahan Penduduk.

Dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana, diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Keluarga. Pada pasal 7 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah meliputi :

1. Pemerintah menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang yang berkaitan dengan pengelolaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga;

2. Kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud diintegrasikan dalam pembangunan jangka menengah dan jangka panjang nasional;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 21 kebijakan keluarga berencana dilaksanakan agar membantu calon atau pasangan suami istri terkait pengambilan keputusan serta mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang, yaitu :

- a. Usia ideal perkawinan;
- b. Usia ideal untuk melahirkan;
- c. Jumlah ideal anak;
- d. Jarak ideal kelahiran anak;
- e. Penyuluhan kesehatan reproduksi.

Tujuan Program Keluarga Berencana meliputi :

- a. Mengatur kehamilan yang diinginkan;
- b. Menjaga kesehatan dan menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- c. Meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek keluarga berencana; dan
- e. Mempromosikan penyusuan bayi sebagai upaya untuk menjarangkan jarak kehamilan.

Keluarga Berencana merupakan suatu program yang direncanakan pemerintah untuk mengupayakan peningkatan kepedulian dan masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga, bertujuan mewujudkan keluarga

sejahtera. Serta Program Keluarga Berencana juga memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan Keluarga yang berkualitas.

Dalam menjalankan program Keluarga Berencana ini, salah satu daerah otonom yang diberikan kewenangan menyelenggarakan Program Keluarga Berencana yaitu daerah Kota Pekanbaru. Semakin meningkatnya perkembangan serta pertumbuhan penduduk, mempunyai pengaruh ataupun dampak negatif seperti kemiskinan disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan. Berikut Penyebaran Penduduk yang ada di Kota Pekanbaru :

Tabel I.1 Luas wilayah dan Jumlah Penduduk menurut kecamatan di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas Wilayah (KM ²)	Jumlah Penduduk
1	Payung Sekaki	43,24	93,479
2	Tampan	59,81	206,267
3	Marpoyan Damai	29,74	130,349
4	Bukit Raya	22,05	101,548
5	Lima Puluh	4,04	41,994
6	Tenayan Raya	171,27	142,711
7	Pekanbaru Kota	2,26	25,784
8	Sail	3,26	21,809
9	Senapelan	6,65	37,024
10	Sukajadi	3,76	47,814
11	Rumbai Pesisir	157,33	69,016
12	Rumbai	128,85	70,219
Jumlah		632,26	1.030.008

Sumber : Badan Pusat Statistik 2017

Bedasarkan tabel di atas luas wilayah kota pekanbaru jika di jumlahkan dari keseluruhan total luas wilayah Kecamatan di Kota Pekanbaru adalah 632.26 Km². Dari luas tersebut dapat diketahui kepadatan penduduk kasar Kota Pekanbaru yaitu 1.030.008 jiwa.

Untuk menangani dan mengelola kependudukan dari jumlah dan kualitas, maka pemerintah daerah Kota Pekanbaru telah membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Pasal 2 Huruf d point 14 Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru telah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

Sebagai OPD yang baru terbentuk Tahun 2017, Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022, adalah perencanaan pembangunan yang pertama yang akan dilakukan dan merujuk kepada arah pembangunan dan Program yang diinginkan oleh Walikota terpilih untuk Tahun 2017-2022.

Selanjutnya Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor

penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas hidup;
2. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan masih tingginya angka kelahiran, serta masih kurangnya pengetahuan PUS yang belum ber- KB;
3. Masih tingginya perkawinan usia muda, masih lemahnya ketahanan keluarga karena alasan ekonomi;
4. Masih kurangnya Petugas Tenaga Penyuluh KB;
5. Masih lemahnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan (stake holders) terhadap Program Keluarga Berencana terutama terkait dengan kelembagaan, kebijakan, perencanaan program dan penganggaran.

Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi permasalahan, apabila tidak diantisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang dilakukan maka akan

menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan diatas, kapasitas pembangunan pelayanan Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses pembangunan secara baik.

Dalam penyelenggaraan Program KB, pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, mempunyai rencana strategis dalam hal:

1. Meningkatkan akses serta pelayanan KB yang merata dan berkualitas;
2. Memperkuat Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KB
3. Meningkatkan pembinaan ketahanan remaja;
4. Peningkatan Pembangunan Keluarga.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 105 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Dalam Menyelenggarakan urusan administrasi umum, struktur Organisasi yaitu :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi;
 1. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan, Dan Penggerakan membawahi;
 1. Seksi Advokasi Dan Penggerakan;
 2. Seksi Penyuluhan Dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;
 3. Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga.

- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi :
 1. Seksi Distribusi Alokasi;
 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 3. Seksi Pembinaan Kesetaraan Keluarga Berencana.
- e. Bidang Ketahanan Dan Kesejahteraan;
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak Dan Lansia;
 3. Seksi Ketahanan Remaja.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :

- (1) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan tugas pembantuan lainnya;
- (2) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi ;
 - a. Perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta inovasi pelayanan administrasi;
 - b. Pengelolaan keuangan dinas;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - f. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - g. Pelaksanaan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
 - h. Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan.

Penelitian berfokus kepada Bidang Keluarga Berencana serta Kasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, dikarenakan mempunyai rincian tugas

serta fungsi dalam Pelaksanaan Pelayanan KB. Bidang Keluarga Berencana (KB) meliputi :

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan Sub urusan Keluarga Berencana.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di Bidang Keluarga Berencana;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Keluarga Berencana;
 - d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi/kota;
 - e. Pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten/kota;
 - f. Pelaksanaan pembinaan kesetaran ber-KB di Kabupaten/Kota;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Berencana;
 - h. Pembeian bimbinganm teknis dan fasilitasi di Bidang Keluarga Berencana;
 - i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
 - j. Pembinaan kinerja dan pengembangan kompetensi bawahan;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Kasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi meliputi :

- (1) Seksi Jaminan Pelayanan KB dalam melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana;

(2) Seksi Jaminan Pelayanan KB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Jaminan Pelayanan KB di daerah;
- b. Perencanaan pembiayaan dalam mendukung kesetaraan ber-KB;
- c. Pemberian sosialisasi dan fasilitasi pelayanan KB dalam JKN/BPJS Kesehatan;
- d. Penyiapan sistem rujukan dalam pelayanan KB MKJP;
- e. Pelaksanaan penjaminan ketersediaan Tenaga Pelayanan KB yang kompeten di seluruh fasilitas pelayanan KB;
- f. Pelaksanaan penjaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB;
- g. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pelayanan KB dengan mitra kerja terkait;
- h. Penguatan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan KB di fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Program Keluarga Berencana (KB) Kota Pekanbaru sudah lama digalakkan untuk mengendalikan tingkat pertumbuhan penduduk yang selalu meningkat. Dalam penyelenggaraan Program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, juga bekerjasama dengan BKKBN (Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional) perwakilan Provinsi Riau. Peningkatan pertumbuhan penduduk salah satunya disebabkan karena meningkatnya angka kelahiran. Hal ini membuat pemerintah harus lebih giat untuk mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB) agar dapat

terlaksana dengan baik. Sasaran Program Keluarga Berencana (KB) yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) bertujuan menurunkan tingginya angka kelahiran menggunakan Alat Kontrasepsi secara berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pelaksanaan program KB adapun waktu Penyuluhan Pelayanan Program KB yang dilaksanakan 26 kali pertemuan dalam 1 tahun, dan Sosialisasi juga Pembinaan Pelayanan Program KB dilaksanakan 22 kali pertemuan disetiap Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru termasuk Lokasi dalam Penelitian ini yaitu Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai. Serta adapun bentuk kegagalan dalam program keluarga seperti penggunaan Alat Kontrasepsi yang tidak berkelanjutan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program KB, nkonsumsi obat yang berinteraksi dengan alat kontrasepsi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan sasaran program keluarga berencana (KB) merupakan pasangan Usia Subur atau PUS. Pasangan Usia Subur yaitu suami istri yang istri berumur antara 15-49 tahun masih haid, atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun tetapi sudah haid atau istri sudah berumur 50 tahun, yang masih haid.

Terwujudnya keluarga sejahtera yaitu dengan menyelenggarakan Pelaksanaan Program KB, dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Peningkatan keterpaduan dan peran serta masyarakat;
2. Pembinaan keluarga; serta
3. Pengaturan kehamilan mencakup agama, perkembangan social ekonomi, budaya, serta tata nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakat.

Bentuk pelayanan dalam Program Keluarga Berencana yaitu :

1. Pelayanan Statis

Merupakan pelayanan yang diberikan di tempat pelayanan yang menetap, misalnya di Puskesmas, Puskesmas pembantu, polindes, rumah sakit, termasuk fasilitas pelayanan kesehatan TNI, Polri, swasta, dan LSOM (Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat)

2. Pelayanan Tim Mobil

Merupakan pelayanan tim mobil dilaksanakan oleh tim.

3. Pelayanan Rutin

Merupakan pelayanan Keluarga Berencana yang diberikan untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, yang diselenggarakan pada jam buka pelayanan seperti biasa (rutin), disemua unit pelayanan Keluarga Berencana yang ada.

4. Pelayanan Bakti Sosial Keluarga Berencana

Merupakan pelayanan Keluarga Berencana dalam bentuk pelayanan bakti sosial Keluarga Berencana sesuai standar kualitas pelayanan statis, dilaksanakan melalui pemanfaatan agenda momen tragis berskala nasional dan daerah atau lokal yang diselenggarakan bersama mitra kerja secara sinergi.

Kota Pekanbaru terdapat 12 Kecamatan serta 83 Kelurahan. Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Tenayan Raya Dan Kecamatan Rumbai, karena Kecamatan ini memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Masyarakat yang belum

menggunakan Program Keluarga Berencana masih banyak sekali, artinya dari jumlah Kartu Keluarga (KK) dan pasangan usia subur (PUS) yang besar masih ada sebagian besar yang tidak ikut Program Keluarga Berencana. Berikut ini adanya jumlah peserta Keluarga Berencana aktif Kota Pekanbaru :

Tabel 1.2 Jumlah Peserta Keluarga Berencana Aktif Kota Pekanbaru bulan Desember 2018

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur	Jumlah Peserta KB Aktif
1	Sukajadi	5,208	2,929
2	Pekanbaru Kota	3,837	2,409
3	Sail	2,197	1,317
4	Lima Puluh	4,282	2,495
5	Senapelan	4,316	2,553
6	Rumbai	14,735	9,285
7	Bukit Raya	22,856	13,997
8	Tampan	32,920	17,790
9	Marpoyan Damai	20,369	11,391
10	Payung Sekaki	28,714	9,311
11	Rumbai Pesisir	14,575	8,140
12	Tenayan Raya	22,462	14,049

Sumber : DIS DALDUK KB Kota Pekanbaru 2018

Masyarakat di beberapa kecamatan di kota pekanbaru yang tidak menggunakan program keluarga berencana(KB) masih banyak sekali, artinya dari jumlah Kartu Keluarga (KK) dan pasangan usia subur (PUS) yang besar masih ada sebagian besar yang tidak ikut program keluarga berencana (KB). Realita ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kemauan yang di miliki oleh masyarakat

dibeberapa kecamatan ini masih cukup rendah termasuk kecamatan tenayan raya dan Kecamatan Rumbai. Apalagi jumlah masyarakat yang tidak mengikuti program KB semakin di dukung dengan angka kelahiran yang lebih dari pihak pelaksana program keluarga berencana (KB) untuk lebih giat mensosialisasikan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang betapa bermanfaatnya mengikuti program keluarga (KB) dalam menyusun tingkat pendapatan keluarga sejahtera.

Beberapa informasi dan beberapa orang di Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai, mereka hanya mengetahui manfaat Program keluarga berencana (KB) itu hanyalah untuk menunda kehamilan selanjutnya, mereka tidak mengetahui bahwa selain manfaat itu ada manfaat lain dari Program KB yaitu bertujuan pengendalian pertumbuhan penduduk, menekan angka kelahiran yang menjolak tajam setiap tahunnya, dan juga untuk kesehatan ibu dan anak agar tidak melahirkan prematur atau kekurangan gizi.

Hal ini menandakan bahwa sosialisasi atau penyuluhan dari pihak pelaksana Program keluarga berencana (KB) masih kurang efektif. Meskipun kebijakan pemerintah tentang Program keluarga berencana (KB) tidak termasuk hal wajib, namun alangkah baiknya bisa diikuti demi kesejahteraan bersama. Semakin banyak masyarakat yang tidak mengikuti Program keluarga berencana (KB) maka semakin banyak pula angka kelahiran. Dengan semakin banyaknya angka kelahiran maka semakin banyak pula pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan, dan kurangnya lapangan pekerjaan maka akan mendorong

seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri ataupun menjadi gelandangan dan pengemis demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Bedasarkan Observasi Penulis dilapangan masih terdapat beberapa fenomena yang terkait mengenai Pelaksanaan Program Keluarga Berencana :

- a. Pelaksanaan Program KB dalam bentuk pembinaan pelayanan keluarga berencana (KB) kurang berjalan maksimal, kurangnya pembinaan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait dengan pentingnya Program KB dan masih banyak masyarakat yang tidak mengikuti Program keluarga berencana (KB), sehingga meningkatkan tingkat kelahiran yang kemudian menyebabkan kepadatan penduduk.
- b. Kurangnya kerjasama dengan Tokoh Masyarakat dalam pelaksanaan program KB. Terdapat dari beberapa aktivitas petugas dengan tidak melibatkan Tokoh masyarakat dalam membawa Pasangan Usia Subur untuk mengikuti Program KB, karena tokoh masyarakat memiliki pengaruh di lingkungan demi terlaksanakannya program keluarga berencana (KB);
- c. Masih kurangnya Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (KB). Sedangkan Kota Pekanbaru terdapat 12 kecamatan serta 83 kelurahan , hal ini membuat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana berjalan belum berjalan dengan baik, karena dengan 28 penyuluh, tiap penyuluh ada yang memegang 2 kelurahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kemudian penulis membuat suatu tulisan yang berjudul : **“Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan yang sudah dijelaskan pada latar belakang terdapat rumusan masalah, yaitu : **“Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru?”**.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian bertujuan menilai dan menganalisis Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.
- b. Serta menjelaskan dan mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu pemerintahan.
- b. Dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah terkait penyelenggaraan pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini, penulis akan memamparkan beberapa teori untuk dijadikan landasan teori yang penulis anggap relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini :

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam kehidupan bernegara maka pemerintah bertanggungjawab untuk menjaga dan melindungi serta memenuhi segala kebutuhan serta memenuhi segala kebutuhan masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat dalam mencapai tujuan bernegara yaitu masyarakat sejahtera, adil dan merata.

Di dalam kutipan (syafiie i. , 2011) menyatakan pemerintahan adalah sebuah organisasi yang mempunyai kewajiban mempertahankan sistemnya, serta merupakan sebagian bentuk paksaan dalam hal kekuasaan.

Menurut kutipan (syafiie i. , 2011, hal. 10) Pemerintah merupakan suatu organisasi yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan kewajiban yang menyangkut kepentingan ataupun kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya menurut kutipan (musanef, 2002, hal. 8), yang mengatakan Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari unsur-unsur dinas, yang berkaitan atau saling berhubungan antara dinas dengan masyarakat serta menyatakan pemerintahan yaitu segala bentuk usaha negara untuk pencapaian tujuannya.

Sedangkan menurut (ndraha, 2003, hal. 5) menyatakan pemerintahan merupakan suatu system bertujuan untuk melengkapi serta menjaga kebutuhan yang meliputi pelayanan yang diberikan ke masyarakat.

Dalam kutipan (musanef, 1992, hal. 15) penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintahan umum yang telah ada, maka pemerintahan-pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada.

Menurut (ndraha, 2005, hal. 36) Ilmu Pemerintahan adalah bentuk kegiatan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah merupakan Seluruh organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk melengkapi dan menjaga serta keperluan masyarakat.

Selanjutnya kutipan (Ndraha, 2011, hal. 6) mengatakan pemerintahan yaitu organ yang berkewajiban menjalankan pelayanan public serta memproses pelayanan civil untuk setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntunan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan ini bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia maka berhak menerima layanan civil tertentu, dan pemrintahan wajib melayani.

Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang menyangkut tentang suatu instansi ataupun lembaga, serta hubungan integritas antara instansi-instansi dengan masyarakat. (syafiie i. , 2008, hal. 18).

2. Konsep Kebijakan Publik

Dalam kutipan (Tangkilisan, 2003, hal. 2) kebijakan yaitu sekumpulan kegiatan pemerintah bertujuan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat yang dilakukan langsung ataupun melalui beberapa lembaga.

Bedasarkan kutipan (winarno, 2012, hal. 17) mendefenisikan kebijakan publik merupakan dugaan sementara yang menyangkut kejadian serta dampak yang bisa ditafsirkan.

Selanjutnya kutipan (Agustino, 2008, hal. 6) Kebijakan publik merupakan kaitan antara pemerintah beserta lingkungannya. Namun ada beberapa pihak yang berpendapat mengenai konsep tersebut karena kebijakan publik menyangkut berbagai hal.

Kemudian dalam kutipan (Winarno, 2012, hal. 32-34) adapun rancangan Tahap penyusunan kebijakan publik, meliputi :

- a. Formulasi kebijakan;
- b. Adopsi kebijakan;
- c. Implementasi kebijakan;
- d. Evaluasi kebijkan.

Pernyataan Anderson dikutipan (suharno, 2010, hal. 24-25) ada beberapa kategori kebijakan publik meliputi :

- a. Kebijakan substantif versi kebijakan prosedural. Kebijakan substansif yaitu kebijakan yang menyangkut kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kemudian kebijakan prosedural yaitu kebijakan substansi dapat terlaksanakan.
- b. Kebijakan distributif versi kebijakan regulator versi kebijakan redistributive. Kebijakan distributif meliputi pemanfaatan distribusi untuk masyarakat. Kebijakan regulator yaitu berisi aturan terhadap tingkah laku masyarakat. Serta kebijakan redistributif yaitu kebijakan mengelola sumber daya yang ada dimiliki masyarakat.
- c. Kebijakan material versus kebijakan simbolik. Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- d. Kebijakan material versi kebijakan simbolik. Kebijakan material yaitu kebijakan yang berisi keuntungan yang diberikan kepada sejumlah anggota tertentu. Dan kebijakan simbolis merupakan kebijakan yang bermanfaat untuk sejumlah anggota tertentu.

Selanjutnya (subarsono, 2005, hal. 2) kebijakan publik merupakan pertimbangan keputusan pemerintah mengenai suatu kegiatan yang harus dilaksanakan atau tidak. Hal tersebut menyangkut ruang lingkup yang besar

disamping kewajiban pemerintah juga menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Pengertian kebijakan publik menyangkut beberapa hal meliputi :

1. Kebijakan publik dibentuk Lembaga Pemerintah, tidak Lembaga Swasta;
2. Kebijakan publik meliputi kegiatan yang dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan.

3. Konsep Evaluasi

Kutipan (ndraha, 2003, hal. 201) evaluasi merupakan rancangan pembedaan antara standar dengan fakta. Selanjutnya menurut (ndraha, 2003, hal. 202) ada tiga model evaluasi, diantaranya :

1. Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (pelaku, treatment). Tolak ukurnya adalah Before.
2. Model Das sollen- das sein, yaitu perbandingan antara seharusnya dengan kenyataannya. Tolak ukurnya adalah Das sollen.
3. Model kelompok kontrol-kontrol tes, yaitu perbandingan dengan kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok control.

Selanjutnya dalam kutipan (winarno, 2012) evaluasi dimaksudkan perkiraan, penyerahan jumlah, serta penilaian. Evaluasi menyangkut pembuatan informasi yang meliputi tata nilai ataupun keuntungan dari suatu upaya yang dilakukan. Evaluasi yang menghasilkan informasi yang benar menyangkut kualitas kerja, sesuai kebutuhan, nilai, serta peluang yang dapat dihasilkan dari tingkah laku public.

Dengan kata lain, evaluasi merupakan penilaian tingkat keberhasilan yang diperoleh dengan perbandingan kesuksesan yang diinginkan, menyangkut beberapa aspek yang berdampak terhadap tingkat kesuksesan ataupun kegagalan. Evaluasi bisa dilaksanakan oleh pihak yang sedang melaksanakan kegiatan yang sedang di evaluasi maupun dilakukan oleh orang lain, juga bisa dilaksanakan sesuai aturan atau tidak. Setelah suatu kegiatan berakhir, maka dilakukan proses penilaian atau pertimbangan mengenai hasil kegiatan yang telah dilakukan sudah sesuai dengan pencapaian target atau tidak sesuai.

Untuk menilai kesuksesan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikator keberhasilan yang dikembangkan dalam kutipan (nugroho, 2009, hal. 537) :

1. Efektifitas : menyangkut kesuksesan yang diperoleh, sesuai dengan keinginan;
2. Efisiensi : menyangkut banyaknya upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan yang diinginkan;
3. Kecukupan : menyangkut tingkat kesuksesan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang ada;
4. Perataan : berkenaan dengan apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.
5. Responsivitas : menyangkut penilaian kebijakan sesuai dengan keperluan ataupun selera sekumpulan anggota tertentu;
6. Ketepatan : menyangkut penilaian kesuksesan memiliki tata nilai ataupun sesuai dengan kebutuhan.

Kemudian kutipan (winarno, 2012, hal. 230) evaluasi terbagi tiga yaitu pertama, suatu kegiatan yang menyangkut pada setiap kebijakan. Kedua, memfokuskan kepada proses bekerjanya kebijakan. Ketiga, evaluasi sistematis untuk mengukur kebijakan atau mengukur pencapaian dibanding target yang ditetapkan.

(nugroho, 2004, hal. 185) menyatakan evaluasi mencakup informasi yang benar serta bisa dipercaya meliputi kualitas kerja merupakan keperluan, nilai, serta peluang yang telah diperoleh dari tingkah laku public.

4. Konsep Keluarga

Keluarga merupakan sekumpulan orang yang memiliki keterkaitan kekerabatan terdiri ayah, ibu, adik, kakak, nenek serta kakek. (reinsler, 1980). Kemudian Keluarga merupakan suatu unit sosial yang saling berkolerasi satu sama lain. (logans, 1979) .

Serta Keluarga merupakan suatu persatuan ataupun sekelompok anggota yang memiliki beberapa unsur yang tiap kelompok memiliki unit anggota. (gilis, 1983)

Keluarga merupakan sekelompok anggota yang memiliki keterkaitan darah dalam kehidupan yang berkelanjutan yang bertempat dalam satu rumah, serta mempunyai kewajiban masing-masing. (jhonsons, 1992)

Tipe-tipe keluarga dalam kutipan (stanhope, 1995) :

1. Terikat dalam satu ikatan pernikahan;
2. Mempunyai hubungan darah;
3. Mempunyai ikatan batin;

4. Mempunyai kewajiban satu sama lainnya;
5. Mempunyai hak mengambil keputusan;
6. Adanya kerjasama antar individu keluarga;
7. Adanya komunikasi hubungan antar individu keluarga;
8. Serta tinggal dalam satu rumah.

(maglaya, 1989) mendefinisikan keluarga merupakan sekelompok anggota yang tinggal dalam satu rumah, dikarenakan terkait hubungan darah, dan masing-masing saling berkolerasi untuk menjaga suatu budaya.

Menurut (friedman, 1998) mengatakan bahwa keluarga merupakan dua individu atau lebih yang terhubung dalam satu ikatan agar saling memberi pengalaman melalui pendekatan tindakan, sebagai bagian dari keluarga.

Fungsi dalam keluarga menurut (friedman, 1998) adalah :

- a. Afektif;

Meliputi segala bentuk hubungan dalam suatu keluarga menyangkut keperluan psiko sosial dapat memberikan kesejahteraan keluarga;

- b. Sosialisasi

Meliputi hubungan sejak lahir dengan menerapkan sosialisasi yang menyangkut keperluan anggota keluarga dengan membentuk tingkah laku yang sesuai dengan tata nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat.

- c. Reproduksi

Bertujuan untuk melanjutkan keturunan atau menambah anggota keluarga.

- d. Fungsi ekonomi

Segala bentuk upaya untuk melengkapi keperluan keseluruhan anggota keluarga.

5. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah salah satu fungsi pokok pemerintahan dalam rangka penyediaan jasa dan layanan kepada masyarakat, karena jasa dan layanan merupakan produk tak terwujud yang memiliki nilai secara ekonomis yang disediakan bagi masyarakat yang membutuhkannya, maka melalui penyelenggaraan pelayanan diharapkan tercapai kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi masyarakat. Berdasarkan kutipan (sinambela, 2011, hal. 5) merupakan suatu kegiatan untuk melengkapi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan negara.

Pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan sekumpulan individu meliputi unit atau rancangan bertujuan mengupayakan untuk melengkapi keperluan individu lain sesuai kebutuhannya. (moenir, 2010, hal. 26). Mengenai Pelayanan Publik dikategorikan sebagai bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintahan untuk memberikan bantuan atau menyajikan kebutuhan masyarakat dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Sementara itu menurut (syafiie, 2007, hal. 100) dari aktivitas pelayanan yang diberikan pemerintah yang diharapkan masyarakat dari pelayanan tersebut adalah biaya relatif lebih rendah, waktu untuk mengerjakan harus lebih cepat dan mutu yang diberikan harus relatif lebih bagus.

6. Konsep Manajemen Pemerintahan

Bedasarkan kutipan (Ndraha, 2011, hal. 159) manajemen berupa tata cara menghasilkan usaha yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yang dilakukan berdasarkan fungsi bertujuan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Unsur manajemen yaitu :

1. Menyangkut tujuan hal yang ingin dicapai suatu kelompok kerja atau organisasi yang diputuskan oleh lembaga yang berkualitas.
2. Meliputi fungsi merupakan rancangan tata usaha menyangkut output serta output yang diinginkan, pengelompokan sumber-sumber untuk memperoleh output, serta kontrol mengerakkan sumber-sumber agar sesuai dengan yang diinginkan.
3. Alur produk yang dimulai melalui konsumen setelah menjalankan beberapa prosedur, yang berakhir di komsumer.

Manajemen memiliki fungsi yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan secara menerus agar tercapainya sistem yang efektif, efisiensi, serta produktif. Kemudian ruang lingkup manajemen pemerinthahan berdasarkan kutipan (ndraha, 2013, hal. 160) meliputi :

1. Perencanaan Pemerintahan;
2. Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan;
3. Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan;
4. Control Pemerintahan.

7. Konsep Efektifitas

Menurut kutipan (widjaja, 1993, hal. 32) efektivitas merupakan suatu hasil dari kebijakan yang menyangkut beberapa hal yang diharapkan dapat tercapai.

Selanjutnya (wesha, 1992, hal. 148) menyatakan efektivitas merupakan kesuksesan dari suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu sesuai dengan hasil yang diinginkan.

Kemudian kutipan (sarwoto, 1990, hal. 126) didalam (Rahayu, 2013, hal. 4) mengatakan suatu bentuk keberhasilan dari aktivitas ataupun kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

8. Konsep Pembinaan

Menurut (syadam, 2000, hal. 408) pembinaan merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk memeberikan hasil yang bermanfaat serta bernilai baik unuk mendapatkan hasil yang bagus.

Selanjutnya kutipan (santoso, 2005, hal. 52) yaitu sekumpulan upaya ataupun usaha yang melatih untk tujuan meningkatkan pembinaan tingkah laku ataupun sikap yang lebih baik, dengan mengikuti aturan kebijakan yang telah ditentukan.

Menurut (namawi, 1994, hal. 111) pelaksanaan pembinaan tersebut secara praktis dilakukan berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki perintah, agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode/cara bekerja, dan sasaran yang tepat.

2. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode/cara bekerja, penggunaan alat, menyusun rencana kerja, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan pembinaan personil dengan memberikan kesempatan meningkat pengetahuan, keterampilan/kecakapan, keahlian, kesejahteraan pemberian motivasi intrinsik dan ekstrinsik, pembinaan disiplin, moral dan semangat kerja, peningkatan tanggungjawab dan lain-lain. Misalnya memberikan kesempatan mengikuti kursus-kursus, penataran, pendidikan dan latihan, memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan lain-lain;
4. Memberikan kesempatan ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran berdasarkan kreativitas dan inisiatif masing-masing, baik mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan, dan pelaporan serta upaya-upaya pembinaan personil, maupun dalam mewujudkan inovasi (perubahan) dalam menggunakan metode/cara bekerja guna meningkatkan produktivitas dari segi kualitas dan kuantitas;
5. Memberikan koreksi terhadap personil yang keliru atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, agar timbul kesadaran dari dalam dirinya sendiri motivasi dan usaha memperbaikinya secara tidak dipaksa. Koreksi itu dimaksudkan untuk menimbulkan motivasi, memperbaiki dan meningkatkan prestasi, yang memungkinkan pengembangan karier masing-masing di masa depan.

9. Konsep Kependudukan

Menurut Srijanti dan A. Rahman, Penduduk yaitu sekelompok individu yang tinggal didalam satu tempat atau wilayah, tanpa memandang identitas diri atau asal individu tersebut.

Sedangkan pernyataan dari Ahmad Yani dan Mamat Rahmat, yang mengatakan penduduk yaitu faktor yang sangat berharga didalam suatu wilayah negara.

Selanjutnya adapun kutipan dari Waluyo, Suwardi, Agung Feryanto, Troi Haryanto mendefinisikan penduduk menyangkut kekuatan termasuk beban suatu negara. Menurut kutipan P.N.H Simanjuntak, yang mengatakan penduduk yaitu sekelompok orang yang menetap dalam suatu wilayah negara.

Menurut kutipan Dr. Kartomo, penduduk adalah semua individu yang tinggal dalam suatu wilayah dengan kurun waktu tertentu. Kemudian menurut AA. Nurdiman, penduduk adalah sekumpulan orang yang tinggal dalam suatu wilayah atau negara.

Menurut (ananta, 1993, hal. 22) kependudukan yaitu suatu hal yang berhubungan dengan beberapa aspek penting dalam kependudukan yang meliputi aspek sosial, politik, agama, ekonomi, geografis, geonetik ataupun lingkungannya.

10. Konsep Keluarga Berencana

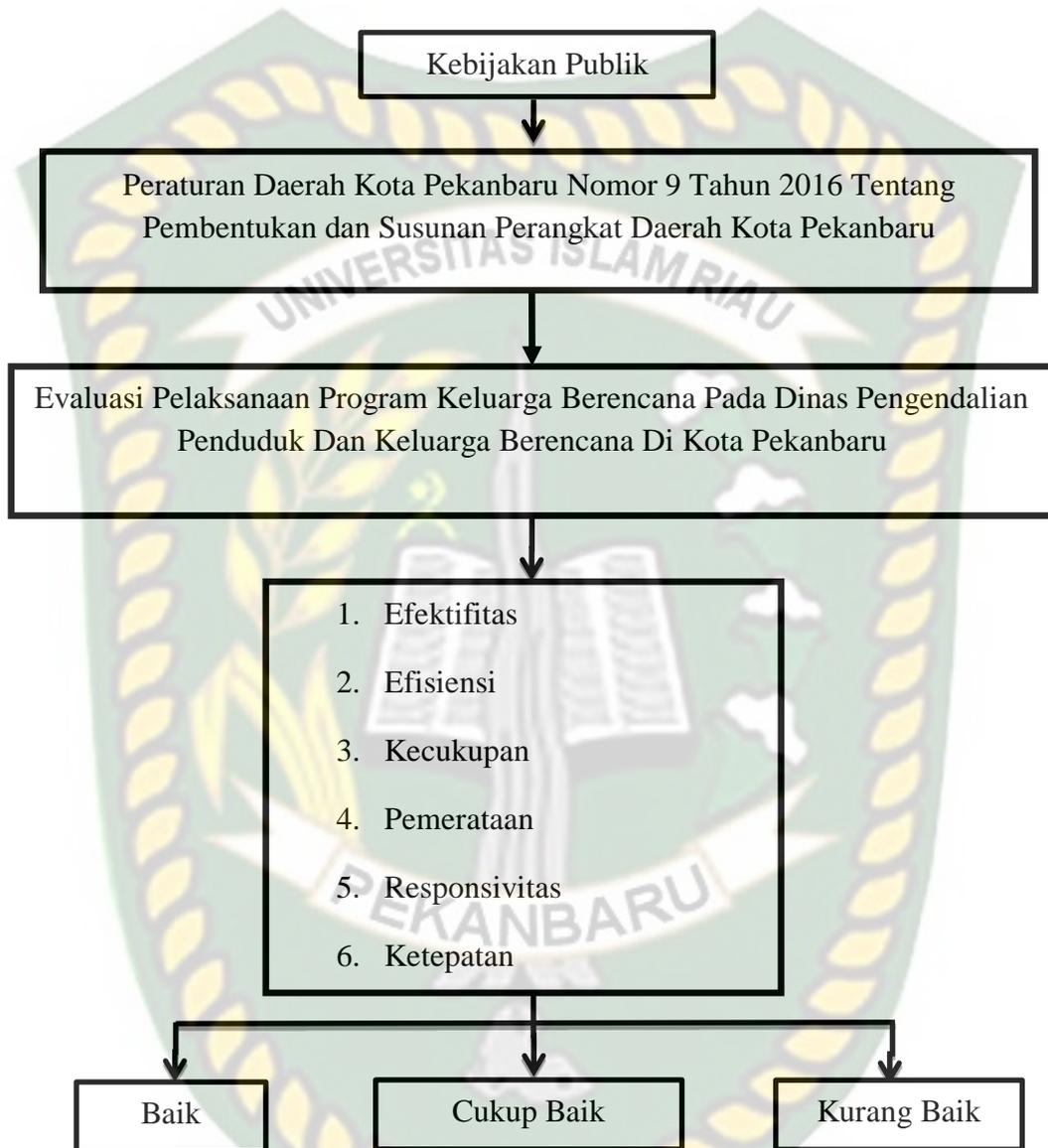
Kutipan H.S.M Nasruddin Latief, Keluarga Berencana adalah suatu ikhtiar atau usaha manusiawi yang disengaja untuk mengatur jarak kehamilan di dalam keluarga secara tidak melawan hukum agama, undang-undang negara dan moral pancasila, kesejahteraan bangsa dan negara pada umumnya.

Kutipan K.H Bisri Musthofa, Keluarga Berencana adalah merencanakan atau mengatur jumlah keluarga yang disukai atau karena terlalu sering isterinya melahirkan, sehingga perlu mengadakan pembatasan (penjarangan kelahiran).

Kutipan Mukhti Ali, Keluarga Berencana adalah sebagai upaya ikhtiar untuk memberikan jaminan kesehatan, untuk sang anak maupun ibu, jaminan pendidikan karena pendidikan merupakan bakal yang sangat berharga untuk kehidupan kelak dalam masyarakat, untuk memenuhi kesejahteraan dan kemakmuran keluarga lahir dan batin.

Kutipan Sarwono Prawiroharjo, Keluarga Berencana adalah menjarangkan kehamilan yang diusahakan mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Kutipan Mrjoo Sir, Keluarga Berencana adalah menjarangkan atau mengatur kehamilan dengan harapan perhitungan keseimbangan ekonomi, baik untuk pendidikan anak-anak, dan lain-lain. Serta kutipan Menurut Masfuk Zuhdi, Keluarga Berencana ditekankan jumlah besar kecilnya anggota keluarga yang lazim ditentukan dengan jumlah anak.

Gambar II.1 Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis 2018

B. Konsep Operasional

1. Evaluasi memiliki pengertian yaitu menetapkan penilaian terhadap tingkat pencapaian keberhasilan dari suatu kebijakan yang dilakukan.
2. Efektifitas yaitu pemanfaatan sumber daya ataupun sarana serta prasarana dengan total angka yang telah ditetapkan bertujuan menghasilkan barang serta jasa yang dijalankan dalam suatu kegiatan.
3. Efisiensi merupakan suatu penilaian kesuksesan, dilihat mulai dari sumber ataupun biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan.
4. Kecukupan adalah pencapaian keinginan yang telah didapatkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
5. Pemerataan adalah melengkapi kebutuhan yang sesuai dengan setiap individu butuhkan, diberikan kepada sasaran yang tepat.
6. Responsivitas reaksi dari suatu kegiatan, menyangkut respon sasaran penilaian melalui pelaksanaan kebijakan serta sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dimasyarakat.
7. Ketepatan merupakan hasil yang diinginkan bisa tercapai atau tidaknya, serta pencapaian hasil harus bermanfaat atau bernilai yang baik.

C. Operasional Variabel

Tabel II.1 Operasionalisasi variabel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Penilaian
Evaluasi adalah dapat disamakan dengan penaksiran, pemberian anagka, dan penilaian. (dunn, dalam riant nugroho, 2009 ;536)	Evaluasi Pelaksanaan program keluarga berencana pada dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana di kota pekanbaru	1. Efektifitas	a. Adanya sosialisasi ke masyarakat b. Adanya pembinaan tentang program KB	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		2. Efisiensi	a. Adanya penyuluhan dalam pelaksanaan pelayanan KB b. Adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		3. Kecukupan	a. Masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti program KB b. Tidak sebandingnya penyediaan tenaga penyuluh KB dengan jumlah masyarakat yang ada	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		4. Pemerataan	a. Adanya tim pengawas dalam pelaksanaan pelayanan KB b. Adayana sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KB	Baik Cukup Baik Kurang Baik

1	2	3	4	5
		5. Responsivitas	a. Pelaksanaan program KB berjalan dengan baik b. Banyaknya pihak yang mengikuti aturan	Baik Cukup Baik Kurang Baik
		6. Ketepatan	a. Pelaksanaan penyelenggaraa n program KB sesuai dengan sasaran yang dituju b. Pelaksanaan program KB sesuai dengan aturan yang ada	Baik Cukup Baik Kurang Baik

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

D. Teknik Pengukuran

Untuk menentukan pengukuran masing-masing indikator dari variabel penelitian ini diklarifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu : Baik, Cukup Baik, dan Kurang Baik. Uraian dari masing-masing penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Baik : Apabila rata-rata presentase indicator efektivitas telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indicator efektivitas terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indicator efektivitas terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

2. Efisiensi

Baik : Apabila rata-rata presentase indicator efisiensi telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indicator efisiensi terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indicator efisiensi terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

3. Kecukupan

Baik : Apabila rata-rata presentase indicator kecukupan telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indikator kecukupan terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indikator kecukupan terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

4. Pemerataan

Baik : Apabila rata-rata presentase indikator pemerataan telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indikator pemerataan terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indikator pemerataan terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

5. Responsivitas

Baik : Apabila rata-rata presentase indikator responsivitas telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indicator responsivitas terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indicator responsivitas terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

6. Ketepatan

Baik : Apabila rata-rata presentase indicator ketepatan telah terlaksana dengan baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 66-100%

Cukup Baik : Apabila rata-rata presentase indicator ketepatan terlaksana cukup baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 34-65%

Kurang Baik : Apabila rata-rata presentase indicator ketepatan terlaksana kurang baik, dengan hasil rekapitulasi responden antara 0-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan survey deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang memperlihatkan situasi yang sebenarnya meliputi objek penelitian yang penulis teliti dengan mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuisisioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable dan penulis juga melakukan wawancara untuk memperkuat jawaban kuisisioner yang telah disebar. Selanjutnya dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif.

B. Lokasi Penelitian

Kemudian penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan alasan bahwa penulis ingin mengetahui Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan pada Kecamatan Tenayan Raya serta Kecamatan Rumbai, dengan alasan kecamatan ini mempunyai jumlah penduduk yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Pekanbaru.

C. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi meliputi obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti agar dipelajari serta selanjutnya diambil kesimpulannya (sugiyono, 2014, hal. 80). Sampel merupakan bagian dari populasi yang digunakan untuk menjadi sumber data dalam penelitian. Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai teknik penarikan sampel. Adapun sampel yang digunakan sebagai berikut :

Tabel III.1 Jumlah populasi dan sampel penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

No	Populasi	Jumlah		Persentase
		Populasi	Sampel	
1	Kepala Dinas	1	1	100%
2	Kepala Bidang KB	1	1	100%
3	Kasi Jaminan Pelayanan KB	1	1	100%
4	Masyarakat Kecamatan Rumbai yang mengikuti Program Keluarga Berencana	21.296	20	0,09%
5	Masyarakat kecamatan Tenayan Raya yang mengikuti Program Keluarga Berencana	13.804	20	0,14%
6	Tokoh Masyarakat	2	2	50%
Jumlah		35.076	45	0,12%

Sumber : Modifikasi Penulis 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang menyangkut penelitian ini memakai “*Sensus*” untuk Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode wawancara karena jumlah populasi yang sedikit. Dan “*Purpose Sampling*” untuk menentukan sampel masyarakat

Kecamatan Tenayan Raya dan masyarakat Kecamatan Rumbai karena jumlahnya yang cukup besar. Sensus merupakan teknik menentukan sampel jika seluruh anggota populasi dipakai sebagai sampel. (sugiyono, 2014, hal. 85). Sedangkan Purposive Sampling yaitu teknik yang menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 2014, hal. 85).

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari :

1. Data primer

Adalah data yang didapat secara langsung melalui sumber utama dilapangan, melalui wawancara dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Keluarga, dan Kasi Jaminan Pelayanan KB, dengan mengajukan berbagai pertanyaan seputar Pelaksanaan Program Keluarga Berencana. seperti Sosialisasi, Penyuluhan, dan Pembinaan dibidang Keluarga Berencana.

2. Data Sekunder

Yaitu sumbernya adalah dokumen yang berkaitan atau berhubungan dengan penelitian ini yaitu dokumen yang diperoleh melalui perpustakaan, intansi/kantor Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Buku-Buku, LaporanLaporan penelitian yang sudah ada serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik pengumpulan Data

Bertujuan mendapatkan data-data dan informasi yang lengkap dan yang dibutuhkan oleh penulis sesuai penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilaksanakan dengan :

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan informasi tentang variable-variable yang akan diteliti dalam penelitian, meliputi :

1. (riduwan, 2004, hal. 104) menyatakan observasi yaitu Teknik pengumpulan data, dimana peneliti melaksanakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilaksanakan.
2. (komalasari, 2011, hal. 81) menyatakan kuisisioner yaitu suatu alat pengumpulan data meliputi assessment non tes, menyangkut serangkaian yang diajukan kepada responden.
3. (nazir, 1988) menyatakan wawancara yaitu proses mendapatkan informasi guna tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara).

4. (sugiyono, 2011, hal. 329-330) menyatakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang lama, dokumentasi meliputi tulisan, gambar, ataupun karya-karya monumental dari seseorang.

G. Teknik Analisis Data

Selanjutnya jika semua data terkumpul sudah terkumpul dan lengkap, kemudian data dikelompokkan berdasarkan sumber, jenis dan bentuk data, selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan teknik kuantitatif.



H. Teknik Analisa Data

I. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke																			
		Juni				Oktober- November				Desember				Januari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■															
3	Revisi UP						■														
4	Revisi Kusioner								■												
5	Rekomendasi Survey									■	■	■	■								
6	Survey Lapangan											■	■	■	■	■	■				
7	Analisis Data															■	■	■	■	■	■
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																			■	■
9	Konsultasi Revisi Skripsi																			■	■
10	Ujian Konferehensif Skripsi																			■	■
11	Revisi Skripsi																			■	■
12	Penggadaan Skripsi																			■	■

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pertumbuhan kota Pekanbaru berawal dari sungai Siak berfungsi untuk sarana transportasi dengan pengiriman hasil bumi dimulai di daerah pedalaman serta dataran tinggi Minangkabau ke daerah pesisir Selat Malaka. Abad 18, daerah senapelan dipinggir sungai Siak, telah ditetapkan menjadi pasar pekan untuk pedagang dari daerah Minangkabau.

Selanjutnya dengan berjalannya waktu, kota ini berkembang menjadi daerah pemukiman yang padat. Berdasarkan musyawarah Dewan Menteri pada tanggal 23 Juni 1784 dari Kesultanan Siak, meliputi datuk 4 suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, serta Kampar). Daerah ini kemudian diberi nama Pekanbaru, yang selanjutnya menjadi hari lahir kota ini.

2. Keadaan Geografi

Bedasarkan tata letak kondisi kota Pekanbaru mempunyai posisi yang strategis terletak di jalur lintas Timur Sumatera, berhubungan dengan beberapa kota yaitu Medan, Padang, Jambi. Kemudian daerah administratif, diapit

wilayah Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, dan bagian Barat serta Selatan wilayah Kabupaten Kampar.

Pada tahun 1960 Pekanbaru dengan luas 162km² yang selanjutnya meningkat menjadi 62.96km² memiliki 2 kecamatan meliputi Kecamatan Senampelan serta Kecamatan Lima Puluh. Kemudian Tahun 1965 memiliki 6 Kecamatan serta di Tahun 1987 memiliki 8 Kecamatan serta Luas Daerah 446.50 km². Kemudian Pemerintah Wilayah Kampar memperluas daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya di tahun 2003 total Kecamatan Kota Pekanbaru di kembangkan menjadi 12 Kecamatan, hingga saat ini di tahun 2019 total Kecamatan tetap 12 Kecamatan.

3. Kependudukan

Tahun 2014, Pekanbaru sudah ditetapkan menjadi kota 4 yang memiliki penduduk terbanyak di pulau sumatera. Pesatnya pertumbuhan Penduduk Pekanbaru, menyebabkan meningkatkan Laju pertumbuhan Penduduk.

Agama islam termasuk agama yang termasuk terbanyak di anut penduduk Kota Pekanbaru sebesar 82,65%, katolik 3,82%, Protestan serta Kristen 10,39%, Hindu 0,40%, dan Konghucu 0,03%. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi yang cukup besar adalah melayu 26.10%, jawa 15.70%, batak 11.06% dan tionghoa 2.5% dan lain-lain 6.7%. Perpindahan Ibukota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Walikota. Efektifitas pemerintahan kota Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), walau pada tanggal 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada tanggal 9 November 1959, kembali ditunjuk datang Wan Abdul Rahman sebagai Walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Indragiri.

a. Orde Baru

Selanjutnya di pemerintahan orde baru, memberi perubahan terhadap system pemerintahan pada Provinsi Riau, meliputi Kota Pekanbaru. Kelompok militer dimulai menetapkan sikap serta dengan datangnya hegemoni dan kekuasaan politik yang membawa dampak di Kota Pekanbaru.

b. Otonomi Daerah

Pada masa Pemerintahan otonomi daerah yang sangat luas, sudah mengeluarkan euphoria yang lebih di sebagian sekumpulan masyarakat di Pekanbaru. Kecendrungan tertentu menyangkut bidang ekonomi serta politik, dan mengajak masyarakatnya berperan kriminal. Dari sebagian sekumpulan masyarakatnya yang dijadikan api dalam sekam, apabila dibiarkan akan menjadi disintegrasi terhadap masyarakat Kota Pekanbaru.

5. Perekonomian

Kota Pekanbaru merupakan Kota Metropolitan. Peningkatan perekonomian Pekanbaru berpengaruh dengan pabrik perkebunan kelapa sawit, kemunculan perusahazan minyak, sera kertas. Sector perdagangan menjadi sandaran Kota Pekanbaru, dilihat melalui adanya pembangunan infrastruktu seperti pembangunan jalan-jalan umum, pembangunan fasilitas umum, pembangunan ruko dan lain sebagainya.

Seperti dilihat adanya pusat perbelanjaan meliputi : mal pekanbaru, mal ciputra, plaza citra, panam square, dan lain sebagainya. Namun seiring perkembangan pusat Pembelanjaan Kota Pekanbaru, Pemerintah tetap selalu mengupayakan menjadikan pasar tradisional sebagai pusat pembelanjaan dengan memperbaiki infrastrukturnya. Hal tersebut dilihat masih terdapatnya pasar bawah, pasar kodim, pasar bawah, serta pasar limapuluh kota.

B. Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

1. Sejarah singkat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Pembentukan Dinas pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

2. Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

Membantu Urusan Walikota Pada Program Kependudukan, yang menyangkut bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

3. Visi Dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

a. Visi

Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas melalui pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuju Kota Pekanbaru sebagai Smart City yang Madani.

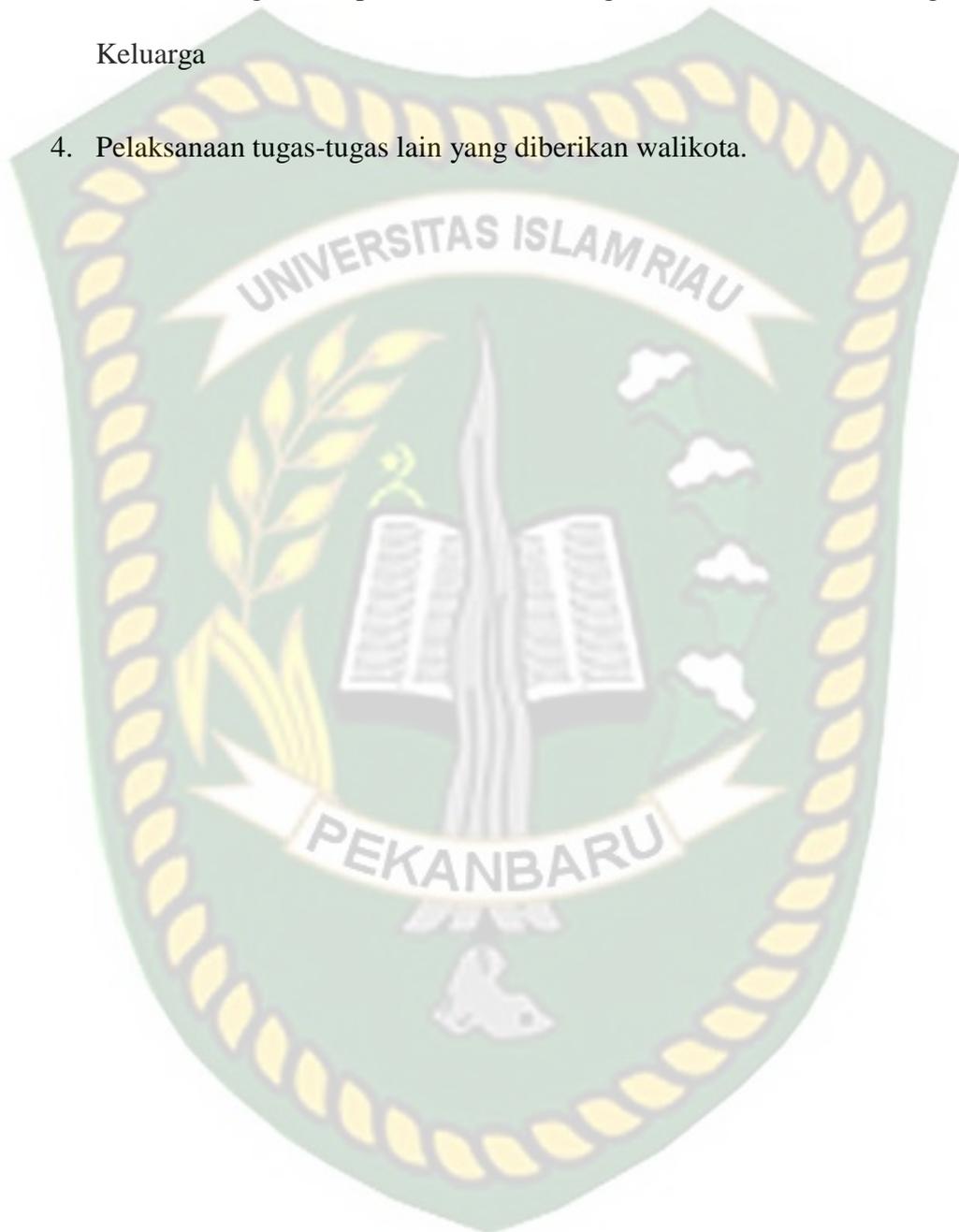
b. Misi

1. Menyelenggarakan Pembangunan yang berwawasan kependudukan
2. Melaksanakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Mengembangkan Kemitraan Dalam Pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

4. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru

1. Perumusan Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

2. Pelaksanaan Kebijakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
3. Evaluasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan walikota.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam melakukan penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru, penulis mengumpulkan data-data dan sekaligus menganalisa hasil data yang terdapat pada kuisioner penelitian yang diawali dengan identitas responden dalam melakukan penelitian ini. Adapun identitas responden yang dianggap perlu untuk dipaparkan adalah sebagai berikut :

1. Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel V.1 Jenis Kelamin dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai (yang Mengikuti Program KB)

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	7	18
2	Perempuan	33	82
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan tabel V.1 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai yang mengikuti Program KB di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat mengemukakan bahwa yang jenis kelamin laki-laki hanya 7 orang dengan

presentase 18%, untuk yang jenis kelamin Perempuan 33 orang dengan presentase 82%.

2. Identitas Responden berdasarkan Umur

Tabel V.2 Tingkat Umur dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai (yang Mengikuti Program KB)

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	22-30	24	60%
2	31-40	12	30%
3	41-50	4	10%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Berdasarkan tabel V.2 diatas, dalam pengelompokan identitas responden dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai yang mengikuti Program KB di Kota Pekanbaru, maka penulis dapat mengemukakan bahwa yang berumur 22-30 tahun hanya 24 orang atau 60%, untuk yang berumur 31-40 berjumlah 12 orang dengan persentase 30%, yang berumur 41-50 tahun berjumlah 4 orang dengan persentase 10%.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berfikir seseorang dalam mengambil sebuah keputusan maupun memberikan pendapat. Tingginya pendidikan seorang individu, juga mempengaruhi tingginya kemampuan berpikirnya.

Tabel V.3 : Jenjang Pendidikan dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai (yang Mengikuti Program KB)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	S-1 (Sarjana)	20	50%
2	SMA	13	33%
3	SMP	7	17%
Jumlah		40	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2019

Seperti yang kita lihat pada tabel V.3 diatas bahwa latar belakang Pendidikan Strata Satu (S-1) dengan presentase 50% yang berjumlah 20 orang, merupakan tingkat Pendidikan responden yang mendominasi dari unsur Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai yang mengikuti Program KB di Kota Pekanbaru, data tersebut menjadi landasan yang kuat bagi penulis untuk meyakini bahwa hasil data yang penulis peroleh dari responden tersebut adalah data yang cukup matang dijadikan sebagai pedoman dari penelitian ini.

B. Hasil Penelitian

Berikut ini penulis akan sajikan hasil penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru. Untuk mengevaluasi sejauh mana Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana , maka indikator-indikator evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas

Dalam kutipan (sondang, 2001, hal. 24) menyatakan Efektifitas yaitu memanfaatkan sumber daya, sarana serta prasarana dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya agar menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dilakukan.

Untuk mengetahui bagaimana keterlibatan indicator “efektifitas” dalam proses Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari tabel berikut

Tabel V.4 : Tanggapan Responden dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Adanya sosialisasi ke masyarakat	5 (12%)	20 (50%)	15 (30%)	40 (100%)
2.	Adanya pembinaan tentang Program KB	6 (15%)	24 (60%)	10 (25%)	40 (100%)
Jumlah		11	44	25	80
Rata-rata		6	22	12	40
Persentase		15%	55%	30%	100%

Sumber : data olahan penulis 2019

Dalam tabel V.4 dijelaskan mengenai tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Efektifitas, yang mana kategori Baik berjumlah 6 orang responden dengan

persentase 15%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masyarakat pernah mendapatkan sosialisasi tentang Program Keluarga Berencana.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Efektifitas, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 22 orang responden dengan persentase 55%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masyarakat pernah menerima sosialisasi mengenai Program Keluarga Berencana tetapi masyarakat tidak pernah mendapatkan pembinaan tentang Program KB.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik terhadap indikator Efektifitas ada sebanyak 12 orang responden dengan persentase 30%. Dengan alasan masih kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga pemahaman masyarakat masih kurang terkait Program KB, serta masyarakat tidak pernah mendapatkan pembinaan dari pihak pelaksanaan Program KB.

Dari tabel V.4 di atas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai, terhadap indikator Efektifitas berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 22 orang atau sama dengan 55% dari total keseluruhan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai.

Bedasarkan hasil Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana yaitu Ibu Dra.Erni Nesrayeti, Pada Hari Senin 4 Februari 2019, beliau menyampaikan bahwa :

“ Kami pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru telah Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Program Keluarga Berencana (KB), karena KB ini merupakan program yang digalakkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran serta dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk”.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan dengan Kasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana yaitu Ibu Rahmiyanti, A,Md,Keb.SKM, Pada Hari Jum'at, 1 Februari 2019, beliau menyampaikan bahwa :

“ Kami sudah memberikan pembinaan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana seperti menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi dan cara menggunakannya, dan dalam memberikan pengarahan tersebut kami bekerjasama dengan tenaga medis seperti Bidan dalam penggunaan alat kontrasepsi”.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa pelaksanaan Program KB yang menyangkut sosialisasi serta pengarahan mengenai Program KB sudah dilakukan oleh Pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Sebagaimana dari hasil pengamatan serta data yang penulis dapatkan mengenai Pelaksanaan Program KB, dimana dapat dijelaskan bahwasanya memang benar adanya bahwa pihak Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru telah melakukan Pelaksanaan Program Keluarga

Berencana dengan memberikan sosialisai serta pengarahan terhadap masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana, namun dalam kenyataannya berdasarkan pernyataan masyarakat dalam pelaksanaan Program KB masih kurangnya sosialisasi tentang Program KB sehingga pemahaman masyarakat tentang Program KB masih kurang, serta masyarakat tidak pernah mendapatkan pembinaan dalam Program KB yang berarti pelaksanaan Program KB masih kurang berjalan maksimal.

2. Efisiensi

Efisiensi yaitu mengukur tingkat keberhasilan yang dinilai dari besarnya sumber/biaya agar terwujudnya hasil dari aktivitas yang dilakukan.

kemudian lebih jelasnya tanggapan responden Masyarakat yang mengikuti Program KB pada tabel berikut :

Tabel V.5 : Tanggapan Responden dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai

No	Item penilaian	Kriteria jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Adanya penyuluhan dalam pelaksanaan pelayanan KB	5 (12%)	26 (65%)	9 (23%)	40 (100%)
2.	Adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat	7 (17%)	21 (53%)	12 (30%)	40 (100%)
Jumlah		12	47	21	80
Rata-rata		6	24	10	40
Persentase		15%	60%	25%	100%

Sumber: data olahan penulis 2019

Pada tabel V.5 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Efisiensi, yang

mana kategori Baik berjumlah 6 orang responden dengan persentase 15%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masyarakat pernah mendapatkan penyuluhan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Efisiensi, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 24 orang responden dengan persentase 60%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masyarakat pernah mendapatkan penyuluhan Program Keluarga Berencana, tetapi tidak mengetahui adanya kerjasama pihak pemerintah dengan tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan Program Keluarga Berencana.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik terhadap indikator Efisiensi ada sebanyak 10 orang responden dengan persentase 25%. Dengan alasan masyarakat tidak mengetahui adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan Tokoh Masyarakat untuk penyelenggaraan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana.

Dari tabel V.5 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai, terhadap indikator Efisiensi berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan respodem sebanyak 24 orang atau sama dengan 60% dari total keseluruhan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai.

Bedasarkan Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana yaitu Ibu Dra.Erni Nesrayeti, Pada Hari Senin 4 Februari 2019, beliau menyampaikan bahwa :

“Pembinaan dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana sudah kami lakukan agar pelaksanaan Program Keluarga Berencana dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai ”.

Adapun hasil wawancara yang di lakukan dengan Kasi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana yaitu Rahmiyati, A.Md,Keb.SKM, Pada Hari Jum'at, 1 Februari 2019, beliau menyampaikan bahwa :

“ Supaya tercapainya Penyelenggaraan Pelaksanaan Program KB ini kami melibatkan Tokoh Masyarakat, karena Tokoh Masyarakat mempunyai peran penting dan pengaruh dilingkungannya. Dan adanya kerjasama ini maka Pelaksanaan Program KB inshaAllah dapat berjalan dengan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Dan kami juga menjalin komunikasi dengan masyarakat, kalau tidak ada komunikasi mungkin Program KB ini tidak berjalan dengan baik”.

Selanjutnya adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan salah seorang Tokoh Masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) yaitu Bapak Zainuddin Pada Hari Jumat 1 februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“ Tidak pernah adanya kerjasama yang dilakukan dengan saya, oleh pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Program KB”.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwa pelaksanaan Program KB yang menyangkut Penyuluhan serta Kerjasama dengan Tokoh Masyarakat mengenai Pelaksanaan Program KB sudah dilakukan oleh Pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan dari hasil pengamatan serta data yang penulis dapatkan mengenai Pelaksanaan Program KB, dimana bahwasanya memang benar adanya bahwa Masyarakat pernah mendapatkan penyuluhan Program Keluarga Berencana. Serta terkait kerjasama dengan Tokoh Masyarakat masih kurang berjalan maksimal karena kerjasama yang dilakukan Pihak Pelaksanaan Program KB itu Tokoh Masyarakat tidak mengetahui dan tidak pernah adanya kerjasama.

3. Kecukupan

Kecukupan meliputi evaluasi keinginan yang ingin dicapai yang dianggap sudah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan yang menyangkut beberapa hal. Kecukupan berkaitan sejauh mana tingkat kecukupan dengan mengukur serta membayangkan pilihan yang ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan, nilai serta adanya peluang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Selanjutnya lebih jelas tanggapan responden masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tabel V.6 : Tanggapan Responden dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai Di Kota Pekanbaru

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti Program KB	8 (20%)	22 (55%)	10 (25%)	40 (100%)
2.	Tidak sebandingnya penyediaan Tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dengan Jumlah Masyarakat yang ada	7 (17%)	21 (53%)	12 (30%)	40 (100%)
Jumlah		15	43	22	80
Rata-rata		7	22	11	40
Persentase		17%	55%	28%	100%

Sumber : data olahan penulis 2019

Pada tabel V.6 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Kecukupan, yang mana kategori Baik berjumlah 7 orang responden dengan persentase 17%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti Program Keluarga Berencana.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Kecukupan, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 22 orang responden dengan persentase 55%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa mengetahui masih ada masyarakat lainnya

yang tidak mengikuti Program Keluarga Berencana, dan masyarakat tidak mengetahui adanya Tenaga Penyuluh dalam pelaksanaan program KB.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik terhadap indikator Kecukupan ada sebanyak 11 orang responden dengan persentase 28%. Dengan alasan masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti Program KB serta masyarakat tidak mengetahui adanya tenaga penyuluh KB.

Dari tabel V.6 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai, terhadap indikator Kecukupan berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 22 orang atau sama dengan 55% dari total keseluruhan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai.

Bedasarkan Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas yaitu Bapak Drs. H. Muhammad Amin. M.Si , Pada Hari Senin 4 Februari 2019, beliau menyampaikan bahwa :

“ Dari pendataan program KB yang kami lakukan, masih ada masyarakat yang tidak mengikuti Program KB. Dan hal ini menjadi salah satu Hambatan dalam Pelaksanaan Program KB.”

Selanjutnya adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana yaitu Ibu Dra. Erni Nesrayeti Pada Hari Senin 4 february 2019, beliau menyatakan bahwa :

“ kami menyediakan Tenaga Penyuluh KB disebut juga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersedia 28 Tenaga Penyuluh KB di Kota Pekanbaru, dengan tiap penyuluh memegang 2 Kelurahan”.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwasanya masih ada masyarakat yang tidak mengikuti Program KB serta tidak sebandingnya penyediaan Tenaga Penyuluh KB. Selanjutnya berdasarkan dari hasil pengamatan serta data yang penulis dapatkan mengenai Pelaksanaan Program KB, dimana masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti Program KB dikarenakan masih cukup rendah kesadaran masyarakat untuk mengikuti Program KB tentunya hal ini menjadi salah satu faktor penghambat Pelaksanaan Program KB. Dan juga masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB atau yang disebut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), hanya tersedia 28 Tenaga Penyuluh KB yang tidak sesuai dengan jumlah 83 Kelurahan yang ada di tiap Kecamatan Kota Pekanbaru sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui adanya Tenaga Penyuluh KB.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah melengkapi setiap kebutuhan yang sesuai dengan setiap individu butuhkan, diberikan kepada sasaran yang tepat.

Untuk mengetahui pemerataan yang selama ini diterapkan oleh Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Adanya tim pengawas dalam pelaksanaan pelayanan KB	10 (25%)	19 (48%)	11 (27%)	40 (100%)
2.	Adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program KB	6 (15%)	24 (60%)	10 (20%)	40 (100%)
Jumlah		16	43	21	80
Rata-rata		8	22	10	40
Persentase		20%	55%	25%	100%

Sumber : data olahan penulis 2019

Pada tabel V.7 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Pemerataan, yang mana kategori Baik berjumlah 8 orang responden dengan persentase 20%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat tidak pernah mengetahui adanya tim pengawas dalam penyelenggaraan Pelaksanaan Program KB.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Pemerataan, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 22 orang responden dengan persentase 55%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masih kurangnya mendapatkan sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Program KB saat masyarakat mengikuti Penyuluhan Program KB.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik terhadap indikator Pemerataan ada sebanyak 10 orang responden dengan persentase 25%. Dengan alasan masyarakat tidak mengetahui adanya Tim Pengawas, dan masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelaksanaan Program KB.

Dari tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai, terhadap indikator Pemerataan berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan respondem sebanyak 22 orang atau sama dengan 55% dari total keseluruhan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai.

Bedasarkan Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas yaitu Bapak Drs. H. Muhammad Amin. M.Si , Pada Hari Senin 4 Februari 2019, beliau menyampaikan bahwa :

“ Dalam pelaksanaan pelayanan program KB, Tim Pengawas yang kami sediakan sama dengan Tenaga Penyuluh KB yang menjadi Tim Pengawas saat penyelenggaraan Pelaksanaan Program KB berlangsung”.

Selanjutnya adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Jaminan Pelayanan KB yaitu Ibu Rahmiyanti, A. Md, Keb. SKM Pada Hari Jumat 1 februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“ Dari pihak kami telah menyediakan Fasilitas Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan program KB. Seperti kami telah menyediakan Alat Kontrasepsi dan Mobil Penyuluhan ”.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwasanya tidak adanya tim pengawas serta sudah adanya sarana dan prasarana dalam Pelaksanaan Program KB, Selanjutnya bedasarkan dari hasil pengamatan serta data yang penulis dapatkan dilapangan, bahwa tidak adanya tim pengawas dalam pelaksanaan pelayanan Program KB tetapi hanya ada Tenaga Penyuluh KB dalam Pelaksanaan Pelayanan KB, kurangnya Tenaga Penyuluh KB yang disediakan sehingga menyebabkan kurang berjalan maksimalnya penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan Program KB. Pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru menyediakan sarana serta prasarana dalam pelaksanaan pelayanan KB seperti Tenaga Penyuluh KB, sosialisasi konseling KB, pemberian alat kontrasepsi. Tetapi penyediaan pelayanan pelaksanaan Program KB masih kurang berjalan maksimal, hal ini dikarenakan seperti masih kurangnya Tenaga Penyuluh KB, dan kurangnya pemberian alat kontrasepsi, hal ini dibuktikan dengan adanya masyarakat yang tidak mendapatkan pemberian alat kontrasepsi.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah tanggapan mengenai suatu aktifitas bedasarkan pelaksanaan suatu kebijakan serta menyangkut dengan seberapa tingkat kesuksesan suatu kebijakan dapat mencukup kebutuhan, serta tata nilai dalam suatu kelompok masyarakat.

Untuk melihat bagaimana tanggapan dari Masyarakat yang mengikuti Program KB dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel V.8 : Tanggapan Responden dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai

No	Item Penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Penyelenggaraan Pelaksanaan Program KB berjalan dengan baik	10 (25%)	19 (48%)	11 (27%)	40 (100%)
2.	Banyaknya pihak yang mengikuti aturan	9 (23%)	20 (50%)	11 (27%)	40 (100%)
Jumlah		19	39	22	80
Rata-rata		9	20	11	40
Persentase		23%	50%	27%	100%

Sumber : data olahan penulis 2019

Pada tabel V.8 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Responsivitas, yang mana kategori Baik berjumlah 9 orang responden dengan persentase 23%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti program KB sehingga menjadi salah satu faktor kurang berjalan maksimal penyelenggaraan Program KB.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Responsivitas, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 20 orang responden dengan persentase 50%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa penyelenggaraan Program KB kurang

berjalan maksimal dengan masih adanya masyarakat yang tidak mengikuti program KB.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik terhadap indikator Responsivitas ada sebanyak 11 orang responden dengan persentase 27%. Dengan penyelenggaraan pelaksanaan program KB belum berjalan maksimal, karena masih adanya pihak Pelaksanaan Program KB yang tidak mengikuti aturan.

Bedasarkan Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana yaitu Ibu Dra. Erni Nesrayeti, Pada Hari Senin 4 Februari 2019, beliau menyampaikan bahwa :

“ Penyelenggaraan Pelaksanaan Program KB sudah Kami lakukan kepada masyarakat dengan baik”.

Selanjutnya adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Jaminan Pelayanan KB yaitu Ibu Rahmiyanti, A. Md.,Keb.SKM Pada Hari Jumat 1 februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“ kami telah menyelenggarakan pelaksanaan program KB sesuai dengan aturan yang ada”.

Dari tabel V.8 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai, terhadap indikator Responsivitas berada dalam kategori **“Cukup Baik”**, dengan jumlah tanggapan respodem sebanyak 20 orang atau sama dengan 50% dari

total keseluruhan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwasanya pihak Pelaksana Program Kb telah melakukan Pelaksanaan Program KB dengan baik serta Pihak Pelaksana telah melakukan sesuai aturan, Selanjutnya bedasarkan dari hasil pengamatan serta data yang penulis dapatkan dilapangan, bahwasanya masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pelaksanaan Program KB serta masih adanya pihak yang tidak mengikuti aturan, hal ini dibuktikan masih adanya pihak dari masyarakat yang tidak mengikuti Program KB. Apabila dari tahun ke tahun semakin banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti Program KB, maka dapat terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan Program KB yang merupakan Program Pemerintah yang tujuan utamanya mengendalikan Laju Penduduk untuk keluarga berkualitas.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah apakah suatu keberhasilan yang dihasilkan telah sesuai atau tidak dengan pencapaian target yang diinginkan ataupun bermanfaat? Keberhasilan yang diinginkan harus sesuai dengan tata nilai yang berguna untuk perkembangan disiplin yang lebih baik.

Untuk melihat bagaimana tentang indicator ketepatan ini dapat dilihat dari tanggapan responden Masyarakat yang Mengikuti Program KB dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden dari Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Masyarakat Kecamatan Rumbai

No	Item penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Pelaksanaan penyelenggaraan program KB sesuai dengan sasaran yang dituju	5 (12%)	22 (55%)	13 (33%)	40 (100%)
2.	Pelaksanaan program KB sesuai dengan aturan yang ada	8 (20%)	23 (57%)	9 (23%)	40 (100%)
Jumlah		13	45	22	80
Rata-rata		6	23	11	8
Persentase		15%	57%	27%	100%

Sumber : data olahan penulis 2019

Pada tabel V.9 dijelaskan mengenai tanggapan responden dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Ketepatan, yang mana kategori Baik berjumlah 6 orang responden dengan persentase 15%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masyarakat yang mengikuti program KB yaitu pasangan usia subur.

Kemudian tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana terhadap Indikator Ketepatan, yang mana kategori Cukup Baik berjumlah 23 orang responden dengan persentase 57%,. Dengan alasan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana bahwa masyarakat yang mengikuti program KB yaitu pasangan usia subur tetapi pelaksanaan program KB belum sepenuhnya sesuai aturan yang ada.

Selanjutnya untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat yang mengikuti Program Keluarga Berencana, yang menjawab dalam kategori Kurang Baik terhadap indikator Ketepatan ada sebanyak 11 orang responden dengan persentase 27%. Pelaksanaan program KB belum sepenuhnya sesuai dengan aturan yang ada.

Dari tabel V.9 diatas dapat disimpulkan bahwa untuk tanggapan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai, terhadap indikator Ketepatan berada dalam kategori “Cukup Baik”, dengan jumlah tanggapan responden sebanyak 23 orang atau sama dengan 57% dari total keseluruhan responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Rumbai.

Bedasarkan Wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas yaitu Bapak Drs. H. Muhammad Amin. M.Si , Pada Hari Senin 4 Februari 2019, beliau menyampaikan bahwa :

“ Sesuai pendataan yang pihak kami lakukan, masyarakat yang mengikuti Program KB yaitu masyarakat Pasangan Usia Subur”.

Selanjutnya adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Keluarga Berencana yaitu Ibu Dra. Erni Nesrayeti Pada Hari Senin 4 februari 2019, beliau menyatakan bahwa :

“ kami telah menyelenggarakan pelaksanaan program KB sesuai aturan”.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas bahwasanya Pelaksanaan Program KB sudah sesuai sasaran yang dituju serta telah melakukan sesuai aturan, kemudian berdasarkan dari hasil pengamatan serta data yang penulis dapatkan dilapangan, bahwasanya tentang pelaksanaan Program Keluarga Berencana ini sudah dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang dituju, namun terjadi lagi kendala yang sama yaitu masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengikuti program Keluarga Berencana. Dan juga dalam pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Berencana belum Sesuai aturan yang ada seperti dengan kurangnya sosialisai, kurangnya Tenaga Penyuluhh KB yang mengakibatkan pelaksanaan Program KB belum sesuai dengan aturan yang ada.

Bedasarkan pemamparan dari hasil setiap indikator-indikator dalam penelitian ini, berikut ini akan hasil penulis rekapitulasi penelitian yang dilakukan tentang Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru. Sebagaimana terlihat pada Tabel V.10 berikut ini :

Tabel V.10 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Terhadap Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru

No	Item penilaian	Kriteria Jawaban			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1.	Efektifitas	6 (15%)	22 (55%)	12 (25%)	40 (100%)
2.	Efisiensi	6 (15%)	24 (60%)	10 (25%)	40 (100%)
3.	Kecukupan	7 (17%)	22 (55%)	11 (28%)	40 (100%)
4.	Pemerataan	8 (20%)	22 (55%)	10 (25%)	40 (100%)
5.	Responsivitas	9 (23%)	20 (50%)	11 (27%)	40 (100%)
6.	Ketepatan	6 (15%)	23 (57%)	11 (27%)	40 (100%)
Jumlah		42	133	65	240
Rata-rata		7	22	11	40
Persentase		18%	55%	27%	100%

Sumber : data olahan penulis 2019

Dari tabel V.10 diatas dijelaskan mengenai hasil Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil dari jawaban responden yang menyatakan baik sebanyak 7 orang dengan persentase 18%, sedangkan responden yang menyatakan cukup baik sebanyak 22 orang dengan persentase 55%, dan responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 11 orang dengan persentase 27%, dan dengan penjelasan diatas tentang Teknik pengukuran dimana persentase sebesar 34-65% masuk dalam kategori **CUKUP BAIK**, dengan jumlah responden 22 orang dengan

persentase 55% yang artinya setiap indikator sudah dilaksanakan dengan cukup baik.

C. Factor Penghambat Dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya yang menjadi factor penghambat meliputi :

1. Masih kurangnya informasi atau sosialisai dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) dari Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, karena masih adanya masyarakat yang tidak mengetahui tentang tujuan Program Keluarga Berencana itu dijalankan.
2. Kemudian masalah pada diri masyarakat itu sendiri, karena kurangnya kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) atau masih adanya masyarakat yang tidak melanjutkan Program Keluarga Berencana (KB) dari tahun ke tahun.
3. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan pihak Petugas Lapangan Keluarga Berencana masih kurang berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya Tenaga Petugas Lapangan KB, yang mana 1 petugas menangani 2 kelurahan sehingga membuat Pelaksanaan Program Keluarga Berencana belum berjalan dengan baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru kemudian disimpulkan meliputi :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dikatakan “Cukup Baik” dengan hasil rekapitulasi tanggapan responden sebanyak 22 orang dengan persentase 55%. Hal ini terlihat dari 6 indikator yang sudah penulis tetapkan, dimana Pelaksanaan Program keluarga Berencana Kurang berjalan maksimal yang terbukti dengan hasil observasi penulis dilapangan bahwa pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru tidak ada melakukan Pembinaan dalam Pelaksanaan Pelayanan Program KB, kurangnya kerjasama serta sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru membuat masyarakat kurang mengetahui tentang pentingnya Program KB. Selain itu juga kurangnya Tenaga Penyuluh KB atau yang disebut Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang membuat kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana kurang berjalan maksimal.

2. Berdasarkan hambatan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana yang sudah dijelaskan, dengan kurangnya kesadaran dan kemauan dari masyarakat untuk mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) atau masih adanya masyarakat yang tidak melanjutkan Program Keluarga Berencana (KB) dari tahun ke tahun, maka dapat menjadikan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kurang berjalan maksimal.

B. SARAN

1. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dalam bentuk Pembinaan Pelayanan KB diharapkan dapat lebih ditingkatkan. Hal ini penting untuk Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dapat berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Serta meningkatkan kegiatan sosialisasi, dan pengarahan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengikuti Program Keluarga Berencana.
2. Pelaksanaan Program Keluarga Berencana sebaiknya lebih ditingkatkan. Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, seperti menyediakan dan memberdayakan Tenaga Penyuluh KB supaya penyelenggaraan Pelaksanaan Program Keluarga Berencana berjalan baik serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksanaan kerjasama dengan Tokoh Masyarakat juga harus ditingkatkan, agar Pelaksanaan Program KB dapat berjalan dengan baik. Dan diharapkan sebaiknya Pihak Pelaksana Program KB membuat sanksi tegas terhadap pegawai atau Tenaga penyuluh yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Demi tercapainya Pelaksanaan Program KB yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Annata, Aris. (1993). *Ciri Demografis Kualitas Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi*. Lembaga Demografi: Jakarta
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta.
- Amin Widjaja Tunggal . (1993). *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta : Rineka Cipta
- Friedman. (1998). *Keperawatan Keluarga, Teori dan Praktek*. Jakarta.
- Musanef. (1992). *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Musanef. (2002). *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Ndraha. (2003). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha. (2005). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan baru*. Jakarta: Rineka Jaya.
- Ndraha. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho. (2004). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho. (2009). *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syafiie, i. (2008). *Manajemen Pemerinthahan*. Jakarta: PT. Perca.

Syafiie, i. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, i. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sinambela. (2011). *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.

Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta.

Syafiie, i (2007). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Syafiie, i. (2008). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. perca.

Syafiie, i. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Public*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik (Tori, Proses dan Studi Kasus Edisi Revisi)*. Yogyakarta.

Dokumen :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang : Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang : Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang : Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 105 Tahun 2016 Tentang : Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Internet

Dokumen.tips

www.wawasanpendidikan.com

